



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 385 /BAPPEDA/ TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Bengkayang, perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkayang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- ~~15.~~ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

39. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 54);
40. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 61).

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 18 Juli 2023

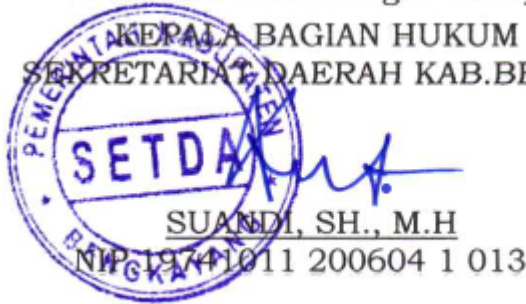
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 385 /BAPPEDA/TAHUN 2023
 TANGGAL : 10 Juli TAHUN 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
 BENGKAYANG

No.	SASARAN STRATEGIS	No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN / FURMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	TANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya angka melek huruf	1	Angka melek huruf (%)	%	Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t dibagi Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikali 100%	Release BPS (Keterkaitan dengan IPM)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan dikalikan 100%		
2	Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun	3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun			DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	4	Angka usia harapan hidup (tahun)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur		
3	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat	5	Konflik antar pemeluk agama	Kasus	Jumlah konflik antar pemeluk agama pada tahun t		SATPOL PP, BADAN KESBANGPOL, 17 KECAMATAN
4	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	6	Proporsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama	%	Jumlah rumah ibadah dibagi Jumlah pemeluk agama dikali 100%		BADAN KESBANGPOL, SEKRETARIAT DAERAH, 17 KECAMATAN
5	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah	7	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	%	Hasil Pengukuran Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja Dan Disiplin		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SDM

No.	SASARAN STRATEGIS	No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN / FURMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	TANGGUNGJAWAB
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	8	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah		BKPAD
7	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	9	Nilai SAKIP	Kategori	Hasil Penilaian Evaluasi		SEMUA PERANGKAT DAERAH
		10	Predikat SPBE	Kategori	Hasil penilaian Kebijakan Internal, Tata Kelola dan Layanan SPBE		
		11	Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat	%	Hasil Penghitungan Rata-Rata SKM Jumlah Perusahaan Yang diwajibkan dikali 100% Semua OPD Pelayanan Publik		
8	Meningkatnya kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha	12	Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan CSR	%	Jumlah Perusahaan Yang melaksanakan CSR dibagi Jumlah Perusahaan Yang diwajibkan dikali 100%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
9	Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	13	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dibagi Panjang jalan seluruhnya	Realese BPS (Keterkaitan dengan Indeks Infrastruktur)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DINAS PERHUBUNGAN
10	Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	14	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	Panjang saluran irigasi dibagi Luas lahan budidaya pertanian		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		15	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi Luas irigasi kabupaten dikali 100%		

No.	SASARAN STRATEGIS	No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN / FURMULASI PENGHITUNGAN		TANGGUNGJAWAB
11	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	16	Rumah tangga berakses air minum (%)	%	Penduduk berakses air minum dibagi Jumlah Penduduk dikali 100%		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		17	Rumah tangga bersanitasi (%)	%	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dibagi Jumlah rumah tinggal dikali 100%		
		18	Persentase penanganan sampah (%)	%	Jumlah sampah yang tertangani (ton) dibagi total jumlah timbunan sampah dikabupaten (ton) dikali 100%		
12	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	19	Rumah tangga pengguna listrik PLN	%	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN		
13	Meningkatnya investasi daerah	20	Investasi (Rp Miliar)	Rp Miliar	Nilai Realisasi Investasi	Realese BPS (Keterkaitan dengan pertumbuhan Ekonomi)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
14	Meningkatnya ekonomi kerakyatan	21	Persentase koperasi aktif (%)	%	Jumlah Koperasi Aktif dibagi Jumlah Koperasi dikali 100%		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
		22	jumlah Usaha Menengah (unit)	Unit	Jumlah Usaha Menengah		
15	Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan dan pengangguran	23	Persentase Penduduk Miskin(%)	%	Realese BPS	Realese BPS (Keterkaitan dengan masalah kemiskinan dan pengangguran)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK, DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		24	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	%	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi Jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100%		

No.	SASARAN STRATEGIS	No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN / FURMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	TANGGUNGJAWAB
16	Meningkatnya kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	25	Kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	%	PDRB sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan dibagi total PDRB dikali 100%	Realse BPS (Keterkaitan dengan PDRB perkapita)	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
17	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan dan jasa	26	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	%	PDRB sektor perdagangan dibagi total PDRB dikali 100%		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		27	Kontribusi sektor Jasa terhadap PDRB (%)	%	PDRB sektor jasa dibagi total PDRB dikali 100%		
18	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata.	28	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	%	PDRB sektor pariwisata dibagi total PDRB dikali 100%		DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa	29	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	%	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dibagi Jumlah seluruh pemerintahan desa dikali 100%		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
20	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD	30	Bimtek untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa (kali/tahun)	Jumlah	Jumlah Bimtek untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
		31	Persentase desa yang menerapkan sistem cashless	%	Jumlah desa yang menerapkan Sitem Cashless dibagi jumlah seluruh desa dikali 100%		
21	Meningkatnya Kemandirian desa dan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan dan internet di desa	32	Indeks Desa Membangun	%	IDM=1/3(IS x IE x IL)		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL, 17 KECAMATAN
		33	Persentase Desa Yang Memiliki Jaringan Listrik	%	Jumlah Desa Yang memiliki jaringan listrik dibagi jumlah desa dikali 100%		
		34	Persentase Desa Yang Memiliki Jaringan Internet	%	Jumlah Desa Yang Memiliki Jaringan Internet dibagi jumlah desa dikali 100%		

No.	SASARAN STRATEGIS	No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN / FURMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	TANGGUNGJAWAB
22	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan	35	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan Wilayah Perbatasan Bidang Infrastruktur	%	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Wilayah Perbatasan Bidang Infrastruktur yang terlaksana dibagi rencana aksi yang ditargetkan dikali 100%		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
23	Meningkatnya volume perdagangan di kawasan perbatasan melalui pembinaan kelompok pedagang	36	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di kawasan perbatasan (%)	%	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun dibagi Jumlah kelompok pedagang/usaha informal dikali 100%		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
24	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	37	Indeks Kualitas Air (IKA)	%			DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		38	Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$		
		39	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	%	$IKTL = 100 - ((84.3 - (KTL \times 100) \times 50) / 54.3)$		
25	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	40	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) (%)	%	Luas wilayah sesuai peruntukan dalam RTRW dibagi Luas Wilayah Kabupaten Bengkayang di kalikan 100%		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
26	Meningkatnya Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana	41	Persentase Desa Tangguh Bencana di kawasan rawan bencana	%	Jumlah desa tangguh bencana dibagi jumlah seluruh desa dikali 100%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASUJANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,

